

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PT. INTI BENUA PERKASATAMA KOTA DUMAI

By: Wan Aditya Fadli
Wanaditya131190@gmail.com
Supervisor: Drs. H. Isril, MH

Department of Governmen
Faculty Of Social Science And Political Science
University of Riau

Campus bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 simp. Baru pekanbaru
Phone fax 0761-63277

ABSTRACT

The title of this research is the implementation of Safety Management System and Occupational Health at PT. Inti Benua Perkasatama Dumai City. The background of this study is the number of incidents of accidents that occur in the PT. Inti Benua Perkasatama Dumai City when the government has issued Law No. 1 of 1970 on Safety and Health at work and the Regulation of the Minister of Labor number 05 of 1996 on Occupational Safety and Health Management aims to minimize the occurrence of accidents.

To ensure the safety and health of workers and others who are in the workplace, as well as sources of production, production process, and the work environment in a safe state, should the application of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). The core purpose of an application SMK3 is to provide protection to workers. However, the worker is a corporate asset that should be preserved and maintained safety.

The purpose of this study was to describe the implementation of safety management systems and occupational health at the PT. Inti Benua Perkasatama by Minister of Manpower Regulation No. 05 of 1996 and describe any efforts undertaken by the company to minimize factors and potential hazards.

This is a qualitative study using the method of direct observation of spaciousness, the informant interviews Head of Section K3 Disnakertrans Dumai, Public Relations of PT. Inti Benua Perkasatama, secretary P2K3 PT. Inti Benua Perkasatama as well as the core part of the production employees of PT. Inti Benua Perkasatama Dumai City.

From these results it can be concluded that the application of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) have not been going well and in accordance with the ministerial decree number PER 05 / MEN / 1996. Implementation still needs to be improved because there is still a shortfall, especially at the stage of inspection and evaluation. Because they inspection and evaluation is still deemed not work effectively, the company also does not have documented procedures in employee skill enhancement training, and incident reporting mechanisms K3 which also does not have documented procedures.

Keyword: Implementation, Occupational Safety and Health Management System (SMK3)

PENDAHULUAN

Latar belakang Masalah

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu masalah penting dalam setiap proses operasional baik di sektor tradisional maupun sektor modern. Khususnya dalam masyarakat yang sedang beralih dari satu kebiasaan kepada kebiasaan lain, perubahan-perubahan ini pada umumnya menimbulkan beberapa permasalahan yang jika tidak ditanggulangi secara cermat dapat membawa berbagai akibat buruk bahkan fatal (Silalahi & Silalahi, 1995).

Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja sudah ada sejak tahun 1930 dengan nama *Mijn Politie Reglement* (MPR) yang merupakan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia – Belanda. Disusul dengan PPRI No. 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan yang dilakukan oleh Menteri Pertambangan.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan undang-undang guna meningkatkan kesadaran bagi pihak perusahaan dan karyawan, undang-undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyebutkan bahwa keselamatan kerja bertujuan untuk (Suma'mur, 1996):

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Namun pada praktiknya, permasalahan ini belum dianggap menjadi isu penting dan belum mendapat perhatian yang

serius oleh perusahaan dan karyawan dalam menjalankan proses produksinya. Hal ini terjadi karena *safety awareness* yaitu kesadaran atas keselamatan yang masih rendah sehingga kebijakan pemerintah dan kebijakan dari pihak manajemen sangat mempengaruhi untuk menciptakan *Behavior Basic Safety* (BBS) dalam lingkungan perusahaan. Kondisi lain adalah masih kurangnya kesadaran dari sebagian besar masyarakat perusahaan, baik pengusaha maupun tenaga kerja akan arti penting K3 merupakan hambatan yang sering dihadapi.

Manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengukuran, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada. Sistem manajemen adalah kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja RI No. Per-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangkapengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Secara umum tujuan dan sasaran dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk menciptakan suatu sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan

kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 ini perusahaan atau organisasi harus berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RINo.Per-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen K3. Pedoman tersebut diantaranya adalah :

- a. Komitmen dan Kebijakan
 - b. Perencanaan
 - c. Penerapan
 - d. Pengukuran dan Evaluasi
 - e. Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen
- Data tentang kecelakaan kerja di wilayah Kota Dumai sendiri masih memprihatinkan. Dari 168 perusahaan yang wajib lapor tenaga kerja ditemukan 145 kejadian kecelakaan dengan 7 orang meninggal. Angka ini masih terbilang tinggi yang memberikan indikasi bahwa masih belum berfungsinya sistem manajemen K3 di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai”** dengan alasan bahwa peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan SMK3 pada PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai serta untuk mengetahui bagaimana tindakan pencegahan kecelakaan kerja oleh perusahaan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui dan mempelajari Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan dari pihak manajemen dalam mengantisipasi dan meminimalisir faktor dan potensi bahaya yang ada dilingkungan kerja perusahaan.

KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Kegunaan secara Teoritis
Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan juga bahan kajian untuk melakukan proses verifikasi konsep teoritis dengan realitas di lapangan sehingga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut.
- b. Kegunaan secara Praktis
Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar pemahaman ketika penulis terjun dan melibatkan diri secara aktif dalam mengembangkan perilaku sadar keselamatan dan kesehatan pada karyawan-karyawan di perusahaan.

KERANGKA TEORI

Definisi Implementasi Kebijakan

Mazmanian & Sabartier (dalam Wahab, 2008:68) menjelaskan Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk

menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh *Adi, Tarwiyah (2005;11)*, yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja RI No. Per-05/MEN/1996 mengenai Sistem Manajemen K3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangkapengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Penerapan SMK3

Lingkup penerapan Sistem Manajemen K3 berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Ukuran organisasi/perusahaan
- b. Lokasi kegiatan
- c. Kondisi budaya organisasi dan atau perusahaan
- a. Jenis aktifitas organisasi/perusahaan

- b. Kewajiban hukum yang berlaku bagi perusahaan
- c. Lingkup dan bentuk Sistem Manajemen K3 yang telah dijalankan
- d. Kebijakan K3 perusahaan
- e. Bentuk dan resiko atau bahaya yang dihadapi (**Ramli, 2009**)

Tujuan SMK3

Secara umum tujuan dan sasaran dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk menciptakan suatu sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Definisi Operasional

- 1) Kebijakan publik adalah sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah dalam bentuk regulasi yang dibuat untuk memberikan solusi bagi masalah di tengah masyarakat dan sarana hukum untuk pencapaian sasaran atau tujuan yang lebih bermanfaat
- 2) Perusahaan adalah suatu unit/badan usaha yang memiliki izin dalam melakukan produksi suatu jasa/barang yang memiliki nilai manfaat pada public dengan nilai tukar tertentu, dimana dalam proses produksinya menggunakan sekelompok sumber daya manusia
- 3) Kecelakaan kerja adalah insiden yang terjadi dalam proses melakukan kegiatan kerja dimana insiden ini dapat merugikan pelaku kerja baik fisik, materi dan psikologis akibat dari kurangnya kesadaran terhadap

- fungsi-fungsi keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- 4) Penerapan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bentuk kesadaran untuk melaksanakan fungsi-fungsi keselamatan dan kesehatan kerja tanpa pengabaian salah satu aspek di dalamnya.
 - 5) P2K3 adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.
 - 6) Informan K1 adalah Seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang ditempatkan di PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai sebagai Sekretaris P2K3 di PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai. Informan H1 adalah Hubungan Masyarakat (Humas) PT. Inti Benua Perkasatama.
 - 7) Informan D1 adalah Seorang pegawai negeri sipil yang ditugaskan di Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang menjabat sebagai pengawas SMK3
 - 8) Informan P1 adalah seorang karyawan PT. Inti Benua Perkasatama yang menjabat sebagai kru mesin produksi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1989:143).

Jenis Data

a. Data primier

Data primier adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang mendalam dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan pertanyaan secara langsung kepada informan tentang penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, PT. Inti Benua Perkasatama dan data yang berasal dari buku, media massa, jurnal, karya ilmiah, seputar masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi
- d.

Lokasi dan Informan Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, dan informan pada penelitian ini adalah tiga orang karyawan PT. Inti Benua Perkasatama dan satu orang pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kepemimpinan dan Komitmen

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris P2K3 perusahaan menunjukkan SMK3 di PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai sepenuhnya diatur dan dikoordinir oleh Manajer Umum dan lembaga P2K3 perusahaan dalam upaya meminimalisir kecelakaan kerja.

Berdasarkan penilaian resiko kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kerja. Seperti pada hasil dokumentasi perusahaan sudah memiliki fasilitas berupa spanduk K3 di perusahaan. Berdasarkan fasilitas yang disebutkan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku perusahaan juga memberikan hak dalam pemberian bonus cuti terhadap karyawan di PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai. Selain itu dengan adanya kerjasama antara perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tersebut, di dalam Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan, selain dalam pembelanjaan bahan baku dan kepentingan-kepentingan perusahaan, perusahaan juga memasukkan rencana anggaran untuk sarana-sarana lain yang diperlukan termasuk pengadaan APD (Alat Perlengkapan Diri), pemberian hak cuti bagi karyawan dan sarana-sarana lain dalam K3.

Perencanaan

Merencanakan pemenuhan kebijaksanaan tujuan dan sasaran penerapan SMK3. Tujuan utama penerapan SMK3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bagaimanapun pekerja adalah aset perusahaan yang paling penting. Dengan menerapkan K3 angka kecelakaan dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali, hal ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan, karena pekerja yang merasa aman dari ancaman kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan bekerja lebih bersemangat dan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perusahaan belum memiliki perencanaan secara tertulis mengenai K3 yang menjelaskan secara

detil bagaimana bentuk perencanaan tersebut.

Penerapan

Dalam rangka meningkatkan jaminan kemampuan karyawan berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai belum melakukan pelatihan untuk meningkatkan *skill* dan kemampuan pekerja melihat dari tanggung jawabnya, dimana dalam hal ini perusahaan melakukan seleksi berdasarkan kriteria-kriteria perusahaan, serta sosialisasi dan pengenalan dan prosedur-prosedur kerja bagi setiap karyawan khusus untuk bidang produksi. Bagi setiap karyawan produksi yang masih baru diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian ataupun masa percobaan yang nanti akan berkembang selama dia bekerja.

Pengukuran dan Evaluasi

Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Dengan melaksanakan audit K3, manajemen dapat memeriksa sejauh mana organisasi telah melaksanakan komitmen yang telah disepakati bersama, mendeteksi berbagai kelemahan yang masih ada, yang mungkin terletak pada perumusan komitmen dan kebijakan K3, atau pada pengorganisasian, atau pada perencanaan dan pelaksanaannya.

Dalam hal ini Perusahaan belum melakukan evaluasi terhadap SMK3 bahkan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Hasil wawancara menjelaskan perusahaan melakukan evaluasi terhadap SMK3 setiap setahun sekali, adapun hasil evaluasi tersebut tidak didukung dengan adanya dokumen ataupun dokumentasi dari pihak perusahaan mengenai tindakan evaluasi tersebut

Pembahasan

Kepemimpinan dan Komitmen

Adapun upaya meminimalisir kecelakaan kerja di PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai dilakukan dalam bentuk kerjasama yang di koordinir langsung oleh P2K3 perusahaan dimana dalam hal ini PT JAMSOSTEK menjadi mitra perusahaan tentang jaminan kesehatan karyawan.

Hasil observasi di PT Inti Benua Perkasatama Kota Dumai menunjukkan perusahaan sudah menunjukkan upaya-upaya mengenai K3 di perusahaan diantaranya adalah pengadaan APD (alat pelindung diri)serta pengadaan spanduk K3, namun upaya tersebut tidak didukung oleh adanya pendokumentasian tentang program-program K3 yang sudah dijalankan di perusahaan.

Perencanaan

Pada Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 poin 2 diterangkan bahwa perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif yang memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja. PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai belum menetapkan tujuan dan sasaran K3 secara rinci. Perusahaan juga belum menjabarkan rentang waktu serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran program K3 serta mendokumentasikannya.

Penerapan

Permenaker No. 05/Men/1996 lampiran 1 disebutkan bahwa dalam mencapai penerapan SMK3 yang baik perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi. Disamping operator mesin yang sudah cukup kompeten, pengendara kendaraan yang mempunyai SIM Perusahaan, dan tenaga kerja dibagian administrasi yang umumnya

bersertifikasi, walaupun PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai telah menempatkan personel yang mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan seperti Ahli K3, tetapi perusahaan belum mempunyai prosedur pendokumentasian dan pengendalian dokumen.

Pengukuran dan Evaluasi

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengukuran dan evaluasi PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana di perusahaan belum ada pelaksanaan inspeksi K3. Perusahaan juga belum mempunyai prosedur inspeksi yang terencana. Yang kesemuanya itu dilator belakangi oleh lemahnya pengawasan dari P2K3 perusahaan dan kurangnya dukungan dan perhatian dari pihak perusahaan khususnya dibidang K3 serta tidak adanya keterbukaan pihak P2K3 perusahaan dan pihak manajemen perusahaan untuk menunjukkan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan K3.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan K3 di PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 Lampiran 1 Poin 2 dimana dalam hal ini perusahaan belum menetapkan tujuan dan sasaran program K3 yang terdokumentasikan.
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan menteri nomor PER 05/MEN/1996. Pelaksanaanya masih perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan, terutama pada tahapan

- inspeksi dan evaluasi. Kerena inspeksi dan evaluasi yang ada masih dirasa belum berjalan dengan efektif, perusahaan juga belum memiliki prosedur terdokumentasi dalam hal pelatihan peningkatan skill karyawan, serta mekanisme pelaporan insiden K3 yang juga belum memiliki prosedur yang terdokumentasikan.
3. Pengukuran dan evaluasi SMK3 di PT. Inti Benua Perkasatama Kota Dumai belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 atau dalam hal ini belum nampak dalam bentuk suatu pernyataan atau surat komitmen dan dokumen tentang pengukuran dan evaluasi mengenai SMK3 di perusahaan.
 4. Meskipun perusahaan telah menetapkan peraturan agar semua karyawan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melakukan aktifitas di areal pabrik, tetapi masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran karyawan akan pentingnya K3 dan lemahnya pengawasan dari P2K3 perusahaan.
 5. Perusahaan telah memfasilitasi seluruh Alat Pelindung Diri (APD) kepada seluruh karyawan.
 6. Perusahaan telah mengadakan penyuluhan tentang penggunaan APD dan pentingnya menggunakan APD untuk keselamatan diri.
 7. Pihak perusahaan telah berupaya menerapkan K3 dengan memasang spanduk atau rambu-rambu di area rawan terjadi kecelakaan kerja.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran kepada perusahaan, yaitu :

1. Perusahaan disarankan agar menetapkan tujuan dan sasaran program K3 secara rinci dan terdokumentasikan. Berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 Lampiran 1 Poin 2.
2. Para pekerja tetap maupun karyawan disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 dan mematuhi segala peraturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. Syukur. 1991. *Perkembangan Penerapan Studi Implementasi*, Jakarta : LAN RI
- Azmi, R. 2008. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh P2K3 untuk Meminimalkan Kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya Beton Medan. *Skripsi*. [Tidak Diterbitkan] Medan : Universitas Sumatera Utara
- Budiono, A, M, Sugeng. 2008. *Hiperkes & KK*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 1970. *Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2005. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta.
- Dunn, William N. 1979. *Analisa Kebijakan Umum*. Yogyakarta: Han Indita

- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*, Englewood, Cliff: Prentice – Hall.
- Kawatu, P, A, T. 2012. *Bahan Kuliah Kesehatan Keselamatan Kerja*. Manado : Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sam Ratulangi.
- Mazmanian, Daniel A & Sabatier, Paul A. 1983. *Implementation and Public Policy*, Illinois, Scott, Foresman and Company
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Rahmat, P, S. 2009. Penelitian kualitatif. *Jurnal Equilibrium, Vol-5, No 9*, 1-8.
- Silalahi, B & Silalahi, R. 1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
- Suardi, Rudi, 2005. *Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Sugiyono. 2009. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suma'mur, 1996. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suma'mur. 1996. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suma'mur. 2009. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : Sagung Seto.
- Sungkono, D. 2014. Data PT Jamsostek Tentang K3. Sumber ; [http://www.data ptjamsostek.com](http://www.data.ptjamsostek.com). diakses tanggal 15 Agustus 2014.
- Tarigan, Z. 2008. Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Medan PTPN V Provinsi Riau. *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana
- Tarwaka, 2008. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13/Presiden Republik Indonesia/ 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Public Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Himpunan Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja RI, 2005 (*diunduh 24 Februari 2013*) <http://PortalK3.com>
- Menakertrans : Dunia Usaha perlu K3 (*diunduh 24 Februari 2013*) <http://ekbis.sindonews.com/read/2012/10/16/34/680284/menakertrans-dunia-usaha-perlu-k3>
- Konsep Dasar Keselamatan Kerja (Health & Safety Protection, *diunduh 27 Februari 2013*) <http://healthsafetyprotection.com/konsep-dasar-keselamatan-kerja/>